



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II YOGYAKARTYA

Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37A Wonosari Telp : (0274) 2902088
Laman : www.lpkajogja.kemenkumham.go.id Surel : lpkajogja@gmail.com

31 Januari 2024

Yth. Kepala KPPN Wonosari
di -
Wonosari

SURAT - PENGANTAR
Nomor: W14.PAS.PAS.6-KU.04.01 - 516

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Satker: LPKA Kelas II Yogyakarta	1 (satu) Berkas	Dikirim sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kepala

Sigit Sudarmono
NIP. 19670724 199203 1 001

Tembusan Yth.

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA

LAPORAN KEUANGAN [UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023]

*Alamat : Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37A, Baleharjo, Wonosari
Telp : (0274) 2902088 Laman : www.lpkajogja.kemenkumham.go.id
Surel : lpkajogja@gmail.com*



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan bayangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wonosari, 26 Januari 2024
Kepala,



Sigit Sudarmono
NIP. 196707241992031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	30
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI. Lampiran dan Daftar	38

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA

*Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37A, Baleharjo, Wonosari Telp: (0274) 2902088
Laman: www.lpkajogja.kemenkumham.go.id Surel: lpkajogja@gmail.com*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonosari, 26 Januari 2024
Kepala,



Sigit Sudarmono
NIP. 196707241992031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.735.950. Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.078.058.604 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.281.260.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2023. Nilai Aset per Tahun 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.720.639.871 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp337.137.611; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.383.502.260; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp16.423.044 dan Rp14.704.216.827.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.389.950, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.739.709.029 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.737.319.079.

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp600.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.736.719.079.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp13.441.194.043 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.736.719.079 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(1.137.350) dan Transaksi Antar Entitas

sebesar Rp7.000.879.213 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp14.704.216.827.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23		% thd Angg	31-Dec-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	4,735,950	851.0	8,187,400
JUMLAH PENDAPATAN		-	4,735,950	851	8,187,400
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	3,170,256,000	3,154,780,636	99.51	2,867,014,835
Belanja Barang	B.3	1,782,544,000	1,779,679,968	99.84	1,788,062,784
Belanja Modal	B.4	144,500,000	143,598,000	99.38	99,849,000
JUMLAH BELANJA		5,097,300,000	5,078,058,604	99.62	4,754,926,619

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA****NERACA****PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-12-2023	31-12-2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak		1,420,400	1,746,000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak		(7,102)	(8,730)
Persediaan	C.2	335,724,313	124,956,609
Jumlah Aset Lancar		337,137,611	126,693,879
ASET TETAP			
Tanah	C.3	-	-
Peralatan dan Mesin	C.4	4,816,039,662	3,534,854,689
Gedung dan Bangunan	C.5	13,480,710,841	13,480,710,841
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.7	598,256,500	49,750,000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.8	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(4,511,504,743)	(3,736,950,619)
Jumlah Aset Tetap		14,383,502,260	13,328,364,911
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.10	-	-
Aset Lain-Lain	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		14,720,639,871	13,455,058,790
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.13	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.14	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.15	16,423,044	13,864,747
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16,423,044	13,864,747
JUMLAH KEWAJIBAN		16,423,044	13,864,747
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.16	-	-
Ekuitas Dana Investasi	C.17	-	-
Ekuitas	C.18	14,704,216,827	13,441,194,043
JUMLAH EKUITAS		14,704,216,827	13,441,194,043

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-12-2023	31-12-2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2,389,950	2,309,400
JUMLAH PENDAPATAN		2,389,950	2,309,400
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,154,780,636	2,867,014,835
Beban Persediaan	D.3	188,634,801	562,388,013
Beban Barang dan Jasa	D.4	972,301,746	1,030,376,611
Beban Pemeliharaan	D.5	325,712,330	333,155,487
Beban Perjalanan Dinas	D.6	325,178,024	273,795,786
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	773,094,390	728,702,490
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		7,102	8,730
JUMLAH BEBAN		5,739,709,029	5,795,441,952
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,737,319,079)	(5,793,132,552)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	-	-
Pendapatan dari Keg. Non Operasional Lainnya	D.9	600,000	1,140,000
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL		600,000	1,140,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5,736,719,079)	(5,791,992,552)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.10	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(5,736,719,079)	(5,791,992,552)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-12-2023	31-12-2022
EKUITAS AWAL	E.1	13,441,194,043	14,269,365,478
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5,736,719,079)	(5,791,992,552)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
		(1,137,350)	(234,060)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	(1,146,080)	(257,750)
Lain - Lain	E.7	8,730	23,690
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		7,000,879,213	4,964,055,177
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.8	-	-
Diterima Dari Entitas Lain	E.9	-	-
Transfer Masuk	E.10	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1,263,022,784	(828,171,435)
EKUITAS AKHIR	E.11	14,704,216,827	13,441,194,043

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta adalah tempat anak berhadapan dengan hukum atau menjalani hukuman pidana. Dasar hukum adanya LPKA Yogyakarta adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum melalui pendidikan yaitu pendidikan kejar paket, pendidikan dkerohanian dan keterampilan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta mempunyai visi: *“Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan Anak Didik Pemasarakatan”*. Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, ramah, dan layak anak
2. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak
3. Membentuk jiwa sportivitas dan cinta ilmu pengetahuan bagi anak
4. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak
5. Memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak anak

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.281.260.000. Sampai 31 Desember 2023, telah dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Terdapat perubahan nominal anggaran awal dan anggaran setelah revisi dilakukan disebabkan revisi antar satker yang dilakukan oleh kantor wilayah. Anggaran setelah dilakukan revisi antar satker oleh kantor wilayah adalah sebesar Rp5.097.300.000.

Realisasi
Pendapatan
Rp4.735.950

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.735.950. Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan Satuan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta terdiri dari Pendapatan dari Sewa rumah dinas Pejabat, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Penerimaan Kembali Belanja Barang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	-	2,389,950	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	-	600,000	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	-	1,746,000	#DIV/0!
Jumlah	-	4,735,950	#DIV/0!

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	2,389,950	2,309,400	3.49
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	600,000	1,140,000	-47.37
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	1,746,000	4,738,000	-63.15
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913)	-	-	
Jumlah	4,735,950	8,187,400	(42.16)

Realisasi Pendapatan Pegawai TA 2023 mengalami penurunan 42,16 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pendapatan pengembalian atas belanja pegawai. Selain itu realisasi Pendapatan Barang TA 2023 mengalami penurunan 63,15 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pendapatan pengembalian atas belanja barang yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Belanja
Rp5.078.058.604

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.078.058.604 atau 99,62% dari anggaran belanja sebesar Rp5.097.300.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,170,256,000	3,154,780,636	99.51
Belanja Barang	1,782,544,000	1,779,679,968	99.84
Belanja Modal	144,500,000	143,598,000	99.38
Total Belanja Kotor	5,097,300,000	5,078,058,604	99.62
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	5,097,300,000	5,078,058,604	99.62

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,154,780,636	2,867,014,835	10.04
Belanja Barang	1,779,679,968	1,788,062,784	(0.47)
Belanja Modal	143,598,000	99,849,000	43.82
Jumlah	5,078,058,604	4,754,926,619	6.80

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,80 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Pegawai yang disebabkan oleh penambahan anggaran belanja pegawai disesuaikan dengan penambahan jumlah pegawai yang bertujuan untuk pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.
2. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.
3. Meningkatnya Belanja Modal karena telah dilakukan pembelian sarana dan prasarana berupa belanja peralatan dan mesin untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pelayanan publik.

Belanja Pegawai
Rp3.154.780.636

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.154.780.636 dan Rp2.867.014.835. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,46 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,143,375,736	2,849,629,010	10.31
Belanja Lembur	20,524,000	18,466,000	11.14
Jumlah Belanja Kotor	3,163,899,736	2,868,095,010	10.31
Pengembalian Belanja Pegawai	9,119,100	1,080,175	744.22
Jumlah Belanja	3,154,780,636	2,867,014,835	10.04

Belanja Barang
Rp1.779.679.968

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.779.679.968 dan Rp1.788.062.784. Realisasi Belanja Barang pada TA 2023 mengalami penurunan 0,89% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Penurunan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama,
2. Penurunan belanja barang untuk mendukung kegiatan operasional kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	441,869,810	504,778,839	(12.46)
Belanja Barang Non Operasional	233,657,774	249,687,830	(6.42)
Belanja Persediaan	218,983,065	224,129,145	(2.30)
Belanja Jasa	295,636,265	274,307,497	7.78
Belanja Pemeliharaan	264,355,030	261,363,687	1.14
Belanja Perjalanan Dinas	325,178,024	273,795,786	18.77
Jumlah Belanja Kotor	1,779,679,968	1,788,062,784	(0.47)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1,779,679,968	1,788,062,784	(0.47)

Belanja Modal
Rp143.598.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp143.598.000 dan Rp99.849.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan 30,47% dibandingkan capaian periode yang sama pada TA 2022 yang mencapai 99,98%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	143,598,000	99,849,000	30.47
Jumlah Belanja Kotor	143,598,000	99,849,000	30.47
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	143,598,000	99,849,000	30.47

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp337.137.611

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp337.137.611 dan Rp126.693.879.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	31-12-2023	31-12-2022
Uang Tunai	-	-
Bank BRI	-	-
Kuitansi	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak
Rp1.413.298

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.413.298 dan Rp1.737.270 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	31-12-2023	31-12-2022
Piutang Bukan Pajak	1,420,400	1,746,000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(7,102)	(8,730)
Jumlah	1,413,298	1,737,270

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka Pendek
Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan
Rp335.724.313

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp335.724.313 dan Rp124.956.609 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	31-12-2023	31-12-2022
Barang Konsumsi	273,724,313	62,956,609
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Amunisi	62,000,000	62,000,000
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	335,724,313	124,956,609

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp14.383.502.260

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.383.502.260 dan Rp13.328.364.911.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Tanah
Rp0

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini diakibatkan karena LPKA Kelas II Yogyakarta berdiri di atas tanah milik Lembaga Pemasarakatan Wonosari.

Peralatan dan Mesin
Rp4.816.039.662

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.816.039.662 dan Rp3.534.854.689.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3,534,854,689
Mutasi tambah:	1,281,184,973
Pembelian	1,281,184,973
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian Aset dari penggunaan	
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	4,816,039,662
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	3,172,905,738
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	1,643,133,924

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp13.480.710.841

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp13.480.710.841 dan Rp13.480.710.841.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	13.480.710.841
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo Per 31 Desember 2023	13.480.710.841
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(1.338.599.005)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	12.142.111.836

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tetap Lainnya
Rp598.256.500

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp598.256.500 dan Rp49.750.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	49,750,000
Mutasi tambah:	
Hibah langsung	548,506,500
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	598,256,500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	598,256,500

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp4.511.504.743

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.511.504.743 dan Rp3.736.950.619.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,816,039,662	3,172,905,738	1,643,133,924
2	Gedung dan Bangunan	13,480,710,841	1,338,599,005	12,142,111,836
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	598,256,500		598,256,500
	Akumulasi Penyusutan	18,895,007,003	4,511,504,743	14,383,502,260

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0*

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0*

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Aset Lainnya
Rp0*

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp16.423.044

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp16.423.044 dan Rp13.864.747.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp16.423.044

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.423.044 dan Rp13.864.747. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	Gaji Pegawai Bulan Oktober
Belanja barang yang masih harus dibayar	16,423,044	Belanja Barang yang dibayar di Bulan Januari
Belanja modal yang masih harus dibayar	-	
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	
Total	16,423,044	

Pendapatan Diterima di
Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB.

Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas
Rp13.594.656.376

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.594.656.376 dan Rp13.441.194.043. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPNP
Rp2.389.950

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.389.950 dan Rp2.309.400. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2022
PENDAPATAN PNBPNP LAINNYA			
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,389,950	2,309,400
Jumlah		2,389,950	2,309,400

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

Beban Pegawai
Rp3.154.780.636

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.154.780.636 dan Rp2.867.014.835. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3,134,256,636	2,848,548,835	10.03
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	-	-
Beban Lembur	20,524,000	18,466,000	-
Jumlah	3,154,780,636	2,867,014,835	10.03

Beban Persediaan
Rp188.634.801

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp188.634.801 dan Rp562.388.013. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,

termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-12-2023	31-12-2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	188,634,801	562,388,013	(66.5)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	188,634,801	562,388,013.00	(66.46)

*Beban Barang dan Jasa
Rp972.301.746*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp972.301.746 dan Rp1.030.376.611. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	109,227,660	112,242,039	(2.69)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	196,935,000	205,102,000	(3.98)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	34,675,000	34,675,000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,340,500	1,919,550	21.93
Beban Honor Operasional Satker	97,800,000	91,320,000	7.10
Beban Barang Operasional Lainnya	1,500,000	59,800,000	(97.49)
Beban Bahan	110,199,651	90,051,380	22.37
Beban Honor Output Kegiatan	0	2,175,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	123,458,123	157,461,450	(21.59)
Beban Daya dan Jasa	296,165,812	275,630,192	7.45
Jumlah	972,301,746	1,030,376,611	(5.64)

*Beban Pemeliharaan
Rp325.712.330*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp325.712.330 dan Rp333.155.487. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,579,600	193,198,640	3.82
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,775,430	68,165,047	(6.44)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	61,357,300	71,791,800	(14.53)
Jumlah	325,712,330	333,155,487	-2.23

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp325.178.024*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp325.178.024 dan Rp273.795.786. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	93,578,024	90,645,786	3.23
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	231,600,000	183,150,000	26.45
Jumlah	325,178,024	273,795,786	18.77

*Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp773.094.390

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp773.094.390 dan Rp728.702.490. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	503,269,684	458,877,784	9.67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	269,824,706	269,824,706	-
Jumlah Penyusutan	773,094,390	728,702,490	6.09
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	773,094,390	728,702,490	6.09

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.102 dan Rp8.730. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	7,102	8,730	(18.65)
Beban Penyisihan Piutang PNBPN			
Jumlah Beban Penyisihan	7,102	8,730	(18.65)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7,102	8,730	(18.65)

Kegiatan Non
Operasional
Rp600.000

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	600,000	1,140,000	-47.37
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	600,000	1,140,000	(47.37)

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp13.441.194.043*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp13.441.194.043 dan Rp14.269.365.478.

*Defisit LO
Rp(5.736.719.079)*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp(5.736.719.079) dan Rp(5.791.992.552). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp(1.146.080)*

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp(1.146.080) dan Rp(257.750).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp8.730*

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.730 dan Rp23.690.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp7.000.879.213

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.000.879.213 dan Rp4.964.055.177.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas lain	5,078,058,604
Diterima dari ke Entitas lain	(4,735,950)
Transfer Masuk	1,379,050,059
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	548,506,500
Jumlah	7,000,879,213

DDEL Rp4.735.950
dan DKEL
Rp5.078.058.604

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp4.735.950 sedangkan DKEL sebesar Rp5.078.058.604.

Transfer Masuk
Rp0

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Pengesahan Hibah Langsung
Rp548.506.500
dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung Rp0

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp548.506.500.

Ekuitas Akhir
Rp13.594.656.376

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.704.216.827 dan Rp13.441.194.043.

Pengungkapan
Lainnya

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

LPKA Kelas II Yogyakarta menalami 8 kali revisi DIPA yaitu:

- A. DIPA awal tanggal 30 November 2022
- B. Revisi ke 1 tanggal 13 Februari 2023
- C. Revisi ke 2 tanggal 13 April 2023
- D. Revisi ke 3 tanggal 10 Juli 2023
- E. Revisi POK tanggal 29 September 2023
- F. Revisi ke 5 tanggal 13 Oktober 2023
- G. Revisi ke 6 antar satker BAMA tanggal 25 Oktober 2023
- H. Revisi ke 7 tanggal 30 November 2023
- I. Revisi POK Akhir tanggal 24 Desember 2023

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tidak ada pengungkapan lain-lain.

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta adalah

Nomor rekening : 0153-01-001385-30-7

An : BPG 149 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS II YK

Bank : PT. BANK BRI (Persero) CABANG
WONOSARI

Saldo : Rp. 0,-

(Rekening periode 1-31 Desember 2023 terlampir).

Wonosari, 26 Januari 2024
Kepala LPKA Kelas Yogyakarta,



Sigit Sudarmono
NIP. 19670724 199203 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PEMASYARAKATAN 05
SATUAN KERJA : LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA 419140

Tgl Data : 12/02/24 6:27 PM
Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,097,300,000	5,078,058,604	(19,241,396)	100	4,811,414,000	4,754,926,619	(56,487,381)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

WONOSARI, 12 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA LPKA YOGYAKARTA

SIGIT SUDARMONO
196707241992031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/02/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,389,950	2,309,400	80,550	3.488
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,389,950	2,309,400	80,550	3.488
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,389,950	2,309,400	80,550	3.488
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,154,780,636	2,867,014,835	287,765,801	10.037
Beban Persediaan	188,634,801	562,388,013	(373,753,212)	(66.458)
Beban Barang dan Jasa	972,301,746	1,030,376,611	(58,074,865)	(5.636)
Beban Pemeliharaan	325,712,330	333,155,487	(7,443,157)	(2.234)
Beban Perjalanan Dinas	325,178,024	273,795,786	51,382,238	18.767
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/02/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	773,094,390	728,702,490	44,391,900	6.092
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7,102	8,730	(1,628)	(18.648)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,739,709,029	5,795,441,952	(55,732,923)	(0.962)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,737,319,079)	(5,793,132,552)	55,813,473	(0.963)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	600,000	1,140,000	(540,000)	(47.368)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	600,000	1,140,000	(540,000)	(47.368)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	600,000	1,140,000	(540,000)	(47.368)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,736,719,079)	(5,791,992,552)	55,273,473	(0.954)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,736,719,079)	(5,791,992,552)	55,273,473	(0.954)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

WONOSARI, 12 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA LPKA YOGYAKARTA



SIGIT SUDARMO
196707241992031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/02/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,441,194,043	14,269,365,478	(828,171,435)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,736,719,079)	(5,791,992,552)	55,273,473	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,137,350)	(234,060)	(903,290)	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,146,080)	(257,750)	(888,330)	-
LAIN-LAIN	8,730	23,690	(14,960)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,000,879,213	4,964,055,177	2,036,824,036	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,263,022,784	(828,171,435)	2,091,194,219	-
EKUITAS AKHIR	14,704,216,827	13,441,194,043	1,263,022,784	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

WONOSARI, 12 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA LPKA YOGYAKARTA


SIGIT SUDARMONO
196707241992031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/02/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	1,420,400	1,746,000	(325,600)	(18.65)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(7,102)	(8,730)	1,628	(18.65)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,413,298	1,737,270	(323,972)	(18.65)
Persediaan	335,724,313	124,956,609	210,767,704	168.67
JUMLAH ASET LANCAR	337,137,611	126,693,879	210,443,732	166.10
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	4,816,039,662	3,534,854,689	1,281,184,973	36.24
Gedung dan Bangunan	13,480,710,841	13,480,710,841	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	598,256,500	49,750,000	548,506,500	1,102.53
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,511,504,743)	(3,736,950,619)	(774,554,124)	20.73
JUMLAH ASET TETAP	14,383,502,260	13,328,364,911	1,055,137,349	7.92
JUMLAH ASET	14,720,639,871	13,455,058,790	1,265,581,081	9.41
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	16,423,044	13,864,747	2,558,297	18.45
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16,423,044	13,864,747	2,558,297	18.45
JUMLAH KEWAJIBAN	16,423,044	13,864,747	2,558,297	18.45
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,704,216,827	13,441,194,043	1,263,022,784	9.40
JUMLAH EKUITAS	14,704,216,827	13,441,194,043	1,263,022,784	9.40
JUMLAH EKUITAS	14,704,216,827	13,441,194,043	1,263,022,784	9.40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,720,639,871	13,455,058,790	1,265,581,081	9.41

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

WONOSARI, 12 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA LPKA YOGYAKARTA

SIGIT SUDARMONO
196707241992031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/02/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,420,400	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	7,102
0.0	117111	Barang Konsumsi	273,724,313	0
0.0	117112	Amunisi	62,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,816,039,662	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,480,710,841	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	598,256,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,172,905,738
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,338,599,005
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	16,423,044
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,078,058,604
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,735,950	0
0.0	313211	Transfer Keluar	25,021,370	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,404,071,429
0.0	391111	Ekuitas	0	13,441,194,043
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,146,080	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	8,730
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	548,506,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,389,950
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	600,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,092,058,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	51,706	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	113,401,310	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	31,569,448	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	76,930,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	144,265,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	993,332	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	119,637,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	547,365,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,985,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	20,524,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	109,227,660	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	196,935,000	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	34,675,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,340,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97,800,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,500,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	110,199,651	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/02/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	123,458,123	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	146,652,642	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	23,120,190	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	39,592,980	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	83,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,579,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,775,430	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	93,578,024	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	231,600,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	503,269,684	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	269,824,706	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	188,634,801	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	61,357,300	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	7,102	0
JUMLAH			25,002,764,145	25,002,764,145

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

WONOSARI, 12 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA LPKA YOGYAKARTA

SIGIT SUDARMO

196707241992031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/02/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,078,058,604
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,735,950	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,389,950
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	600,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,746,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,092,058,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,806	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	113,401,310	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,569,448	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	76,930,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	144,265,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	993,332	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	119,637,840	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	549,104,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15,365,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	20,524,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	107,198,910	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	198,355,400	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	34,675,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,340,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	97,800,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,500,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	110,199,651	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	123,458,123	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	193,708,065	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	25,275,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	144,097,345	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	25,145,940	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	39,592,980	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	83,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,579,600	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,775,430	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	93,578,024	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	231,600,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143,598,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	100
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	1,739,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/02/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 12/02/24 9:32 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	7,380,000
JUMLAH			5,091,913,654	5,091,913,654

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

WONOSARI, 12 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA LPKA YOGYAKARTA

SIGIT SUDARMONO

196707241992031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA
Jalan Mgr sugiyopranoto 37A Wonosari Gunungkidul
Email : lpkajogja@gmail.com

Kepada Yth :

04 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wonosari

Cq. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

SURAT PENGANTAR

Nomor : W14.PAS.PAS.6-KU.04.01- 66

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2023 UPT : LPKA Kelas II Yogyakarta	I (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan dipergunakan seperlunya.



Kepala



Sigit Sudarmono

NIP. 19670724 199203 1 001

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2023, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650924191401000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00122/DRPP/419140/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
<hr/>			
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
<hr/>			
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
<hr/>			
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
<hr/>			
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
<hr/>			
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3	Saldo Lainnya	Rp.	0
<hr/>			
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
<hr/>			
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA
(III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

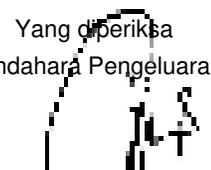
A. Selisih Kas (II.B)

-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



NOVA INDRİYANTO
Penata Muda Tk.I/116198611262009121007



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SIGIT SUDARMONO
IV/a 196707241992031001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-013.05.2.419140/2023

Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA KPPN : (149) Wonosari

Satuan Kerja : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00122/DRPP/419140/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	54.000.000,00	292.979.278,00	346.979.278,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	54.000.000,00	292.979.278,00	346.979.278,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	54.000.000,00	147.798.114,00	201.798.114,00	0,00
	1. BP UP*)	54.000.000,00	53.997.364,00	107.997.364,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	91.183.800,00	91.183.800,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.616.950,00	2.616.950,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. -
2. -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

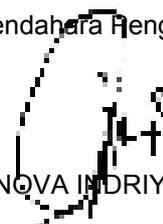


SIGIT SUDARMONO

IV/a 196707241992031001

KOTA YOGYAKARTA, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran



NOVA INDRIYANTO

III/a 198611262009121007

Dicetak pada tanggal, 04 Januari 2024

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 419140

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	650924191401000	BPG 149 LEMBAGA PEMBINA KHUSUS ANAK KELAS II YK	PT. BANK RAKYAT INDONESIA KCP WONOSARI	20	S- 1136/WPB.12/KP. 05/2020	15-06-2020	2023-12-29	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



NOVA INDRIYANTO

Penata Muda Tk. I/ IIIb 198611262009121007

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2023

Kementerian / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA
 Satuan Kerja : (419140) LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA41914000-
 No Rekening : 650924191401000
 Nama Rekening : BPG 149 LEMBAGA PEMBINA KHUSUS ANAK KELAS II YK
 Nama Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA KCP WONOSARI
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			0,00
06-12-2023	FPK-PENG-gLLPhkAwWGv7Ja0	Spm TUP UM dll bulan Des 2023	91.183.800,00	0,00	91.183.800,00
07-12-2023	FPK-PENG-T782BKpA5O7IyTw	spm GU des 1 2023	53.997.364,00	0,00	145.181.164,00
08-12-2023	FPK-PENG-tWaseNxj1tnLcHV	[DARI TUNAI] pu bank spm TUP UM dll des 2023	0,00	91.183.800,00	53.997.364,00
08-12-2023	FPK-PENG-r4rkqSsXdbk5rln	[DARI TUNAI] PU bank spm gu des 1 2023	0,00	53.997.364,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG-NPHyCXCRBsRP1Jk	SPM PTUP des 2023	0,00	0,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG-jBRAMiefGrYNGHb	spm GU nihil Des 2023	0,00	0,00	0,00
Jumlah			145.181.164,00	145.181.164,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



NOVA INDRIYANTO

Penata Muda Tk.I/ IIIb 198611262009121007

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

DITJEN PEMASYARAKATAN (05)

LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA (419140)

Rekening Induk : RKK DITJEN PEMASYARA (032901xxxxx300)

Virtual Account : 650924191401000 | BPG 149 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YK

Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-06	09:38:23	22346407	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogya231491301002701000001	0,00	0,00	91.183.800,00	91.183.800,00	SPAN	
2023-12-07	13:45:02	22591839	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang 231491301002759000001	91.183.800,00	0,00	53.997.364,00	145.181.164,00	SPAN	
2023-12-08	08:26:34	22715444	BPG 149 LAPAS ANAK II YK	145.181.164,00	145.181.164,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		145.181.164,00	145.181.164,00			
			Saldo Akhir				0,00		



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-01-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	149	550500	05-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	C51ED0T78CQEJBIV 231205361288	411124	IDR	11,200	ADA
2	149	550500	05-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	B32E71PKO7CQFGCU 231205362268	411121	IDR	37,500	ADA
3	149	550500	05-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	A6E1267O7C8OL7PP 231205362011	411124	IDR	37,500	ADA
4	149	550500	27-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	486834ET7TURKQG7 231227826147	411124	IDR	14,700	ADA
5	149	550500	05-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	E741D4ET7N3VHK93 231205362504	411121	IDR	587,500	ADA
6	149	550500	05-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	85D41745N6R5CC14 231205361603	411124	IDR	6,400	ADA
7	149	550500	05-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	C688E00POI81TN68 231205361731	411124	IDR	4,000	ADA
8	149	550500	05-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	320005BANHMC0PF6 231205362374	411124	IDR	7,700	ADA
9	149	550500	27-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	3AFDA1PKOE7QAPCQ 231227825798	411121	IDR	587,500	ADA
10	149	550500	27-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	731A30T78JL61E8N 231227826361	411124	IDR	15,000	ADA
11	149	550500	27-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	90A413IFO3CI378C 231227825929	411121	IDR	108,900	ADA
12	149	550500	27-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	E74DE745NDQ1JFIK 231227825704	411121	IDR	1,112,050	ADA
13	149	550500	27-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	27DE61PKOE7FTMAQ 231227826493	411121	IDR	75,000	ADA
14	149	550500	27-DEC-23	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I	F941B745NDLU6FT8 231227826255	411124	IDR	12,000	ADA



TOTAL	2,616,950
-------	-----------

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN



ditandatangani secara elektronik
Lintang Indah Permatasari
NIP 199408042018012003



